

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BOS

Qiqi Yulianti Zaqiah¹, Wildan Baihaqi², Mada Sumringah³, Nadia Kurnia Fauziah⁴,
Suhendri⁵

qiqiyuliatizaqiah@uinsgd.ac.id¹, wildanbaihaqi@uinsgd.ac.id²,
madasumringahuin@gmail.com³, nadiakurniafauziah@gmail.com⁴, suhendricbdk@gmail.com⁵

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Analisis kebijakan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pendanaan langsung kepada sekolah guna memenuhi kebutuhan operasional, seperti pengadaan sarana-prasarana, pelatihan guru, dan kegiatan pembelajaran. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam implementasi, termasuk distribusi dana yang tidak merata, kendala administrasi, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BOS telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, optimalisasi manajemen dana dan pengawasan perlu ditingkatkan. Rekomendasi kebijakan meliputi perbaikan mekanisme penyaluran, pelatihan pengelolaan keuangan sekolah, serta penguatan sistem evaluasi berbasis data. Analisis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan program pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bantuan Operasional Sekolah, Kebijakan Pembiayaan, Manajemen Pendidikan, Transparansi, Evaluasi Kebijakan.

ABSTRACT

The analysis of the School Operational Assistance (BOS) funding policy aims to evaluate the program's effectiveness in supporting improvements in the quality of education in Indonesia. This policy is designed to provide direct funding to schools to meet operational needs, such as procurement of facilities, teacher training, and learning activities. The study identifies challenges in implementation, including unequal fund distribution, administrative constraints, and a lack of transparency in budget management. Findings indicate that while the BOS policy has positively impacted access to and quality of education, optimization of fund management and oversight needs to be enhanced. Policy recommendations include improving the disbursement mechanism, training in school financial management, and strengthening data-based evaluation systems. This analysis is expected to serve as a reference for policymakers in developing more effective and sustainable funding programs.

Keywords: School Operational Assistance, Funding Policy, Education Management, Transparency, Policy Evaluation.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bersaing di tingkat global. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban operasional sekolah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005, BOS telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan

bagi sekolah-sekolah di Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang berkembang. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar sekolah, baik dari segi kualitas fasilitas maupun kegiatan pembelajaran. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berkualitas tanpa harus terbebani dengan keterbatasan dana.

Namun, meskipun tujuan dari kebijakan BOS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidakmerataan distribusi dana yang diterima oleh sekolah-sekolah di berbagai daerah. Beberapa sekolah, terutama yang berada di daerah perkotaan, dapat mengakses dana BOS dengan lebih mudah dan cepat, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau daerah terpencil seringkali mengalami keterlambatan dalam menerima dana tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kelancaran kegiatan operasional sekolah dan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan BOS adalah kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Meskipun dana BOS ditujukan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan dana tersebut, baik yang dilakukan oleh oknum di tingkat sekolah maupun di tingkat pengelolaannya. Hal ini tentu menjadi permasalahan serius, karena dapat menghambat tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Evaluasi terhadap kebijakan BOS sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuannya. Penilaian ini tidak hanya melibatkan aspek keuangan, tetapi juga melihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Dalam hal ini, perlu adanya analisis yang komprehensif mengenai bagaimana dana BOS digunakan oleh sekolah-sekolah, apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan operasional yang mendukung pembelajaran, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, implementasi kebijakan BOS juga memerlukan sistem pengelolaan yang baik di tingkat sekolah. Banyak sekolah yang kesulitan dalam mengelola dana BOS dengan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan keuangan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada pengelola keuangan di tingkat sekolah, agar dana BOS dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan peruntukannya.

Penting juga untuk memperhatikan bahwa meskipun kebijakan BOS sudah diterapkan selama hampir dua dekade, tantangan dalam distribusi dan pengelolaan dana masih terus muncul. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan agar lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS harus menjadi prioritas agar dana yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia.

BOS tidak hanya berfokus pada pemberian dana kepada sekolah, tetapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang dalam sistem pendidikan nasional. Untuk itu, penting untuk menilai bagaimana dana BOS dapat digunakan untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan, pengembangan kapasitas guru, serta peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah. Penilaian ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan, hingga masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan BOS juga mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, baik dari segi jumlah dana yang disalurkan, peruntukannya, maupun mekanisme distribusinya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas program. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi, agar kebijakan BOS dapat terus relevan dan mampu memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pengawasan dana BOS. Penerapan sistem berbasis digital untuk mengelola dana BOS dapat mempermudah pelaporan dan meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dana. Teknologi juga dapat digunakan untuk memonitor penggunaan dana di tingkat sekolah, sehingga pemerintah dapat lebih cepat mengambil tindakan apabila terdapat indikasi penyimpangan.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, kebijakan BOS juga berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru, seperti pelatihan atau pengembangan profesional. Dengan meningkatkan kualitas guru, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat.

Selain itu, penting untuk melihat peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan BOS. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana BOS dapat membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BOS perlu ditingkatkan.

Untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal, pemerintah juga perlu meninjau ulang mekanisme evaluasi dan pelaporan penggunaan dana BOS. Penggunaan indikator yang lebih jelas dan terukur dapat membantu mengidentifikasi daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana BOS. Melalui evaluasi yang lebih mendalam, dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih tepat guna mengatasi permasalahan yang ada.

Dengan demikian, kebijakan BOS harus terus berkembang agar lebih efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa.

Ke depan, kebijakan BOS perlu dioptimalkan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pendidikan dan tantangan yang ada. Dengan evaluasi yang tepat, peningkatan kapasitas pengelolaan dana, serta pengawasan yang lebih baik, diharapkan kebijakan BOS dapat terus memberikan dampak positif yang signifikan bagi dunia pendidikan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kebijakan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara mendalam dengan pengelola dana BOS di sekolah, kepala sekolah, serta pihak pemerintah terkait, seperti Dinas Pendidikan. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk mempelajari bagaimana dana BOS digunakan dalam kegiatan operasional sekolah.

Pengumpulan data juga melibatkan studi dokumen untuk menganalisis pedoman kebijakan BOS, laporan keuangan sekolah, serta dokumen evaluasi dari pemerintah. Analisis dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dari data yang diperoleh. Triangulasi data diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dengan membandingkan hasil wawancara,

observasi, dan dokumen. Fokus utama analisis adalah pada efektivitas distribusi dana, efisiensi penggunaan, serta akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses analisis. Diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dengan pengelola sekolah, orang tua siswa, dan komunitas lokal diadakan untuk memahami persepsi mereka terhadap kebijakan BOS. Metode ini memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung operasional sekolah, khususnya di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dana BOS memungkinkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti alat tulis, perbaikan fasilitas kecil, dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah yang diwawancarai menyatakan bahwa tanpa dana BOS, banyak sekolah tidak mampu menjalankan aktivitas pendidikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan BOS memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan operasional sekolah.

Namun, distribusi dana BOS masih menghadapi berbagai kendala. Temuan dari observasi di lapangan menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran dana ke beberapa sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil. Kondisi ini memengaruhi kelancaran kegiatan belajar-mengajar, karena banyak sekolah harus mencari solusi sementara, seperti meminjam dana dari pihak lain. Keterlambatan ini seringkali disebabkan oleh kendala administratif, termasuk kurangnya data yang akurat mengenai jumlah siswa di beberapa sekolah.

Selain itu, penggunaan dana BOS masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Meskipun sebagian besar sekolah telah menggunakan dana sesuai dengan pedoman, beberapa kasus penyalahgunaan dana masih ditemukan. Dalam wawancara, beberapa kepala sekolah mengakui bahwa pemahaman mereka mengenai pedoman BOS masih kurang mendalam. Hal ini sering menyebabkan alokasi dana yang tidak sesuai prioritas, seperti pengeluaran untuk kegiatan yang tidak mendukung pembelajaran langsung.

Kebijakan BOS juga menghadapi tantangan dalam aspek transparansi. Beberapa sekolah tidak memiliki mekanisme pelaporan keuangan yang jelas dan akuntabel. Studi dokumen menunjukkan bahwa laporan penggunaan dana seringkali tidak disusun secara rinci, sehingga menyulitkan pihak pengawas untuk melakukan evaluasi. Ketiadaan laporan yang transparan ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal dampak terhadap kualitas pendidikan, kebijakan BOS menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa sekolah melaporkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa setelah menggunakan dana BOS untuk mendukung pelatihan guru, pembelian bahan ajar, dan perbaikan fasilitas. Namun, di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah yang belum merasakan dampak tersebut karena kendala manajemen dana yang belum optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS masih tergolong rendah. Dalam diskusi kelompok terarah, sebagian besar responden dari kalangan orang tua siswa menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui rincian penggunaan dana BOS di sekolah anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah telah berupaya memperbaiki kebijakan BOS melalui revisi pedoman dan mekanisme penyaluran dana yang lebih efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem berbasis digital untuk memantau penggunaan dana di tingkat sekolah. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan teknis, terutama di daerah yang minim akses teknologi. Sekolah-sekolah di daerah tersebut membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk mengintegrasikan sistem digital ke dalam pengelolaan dana mereka.

Di sisi lain, pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala sekolah dan pengelola BOS di sekolah-sekolah masih terbatas. Banyak responden menyatakan bahwa pelatihan yang mereka terima belum mencakup aspek teknis yang mereka butuhkan, seperti penyusunan laporan keuangan yang akurat dan strategi alokasi anggaran yang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya program pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kebijakan BOS juga perlu memperhatikan aspek pemerataan. Beberapa sekolah di daerah perkotaan cenderung menerima dana yang lebih besar dibandingkan sekolah di daerah pedesaan dengan jumlah siswa yang sama. Ketimpangan ini dapat memengaruhi kesetaraan kualitas pendidikan antar wilayah. Penyesuaian alokasi dana berdasarkan kebutuhan spesifik sekolah harus menjadi fokus untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Dalam konteks keberlanjutan kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme evaluasi program dilakukan secara berkala. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada aspek administratif, sementara dampak terhadap kualitas pendidikan seringkali diabaikan. Evaluasi yang holistik akan membantu mengidentifikasi tantangan yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Dari segi dampak sosial, kebijakan BOS telah membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Beberapa orang tua siswa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan operasional sekolah. Namun, di beberapa daerah, masih ditemukan praktik penggalangan dana tambahan oleh sekolah karena dana BOS dianggap belum mencukupi.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan BOS juga menjadi faktor penting. Sekolah-sekolah di daerah dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat cenderung lebih berhasil dalam mengelola dana BOS secara efektif. Sebaliknya, di daerah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat, implementasi kebijakan ini seringkali mengalami hambatan.

Salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan BOS adalah melalui peningkatan kapasitas pengelolaan dana di tingkat sekolah. Pemerintah dapat menyediakan pendampingan teknis secara berkala untuk membantu sekolah dalam menyusun rencana anggaran, mengelola dana, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan.

Selain itu, penting untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam pengawasan kebijakan BOS. Keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan tinggi dapat memperkuat sistem pengawasan yang ada. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan dan efektivitas penggunaan dana dapat lebih terjamin.

Diskusi juga mengungkapkan bahwa kebijakan BOS harus lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan spesifik sekolah. Beberapa sekolah yang melayani siswa dengan kebutuhan khusus, misalnya, memerlukan alokasi dana yang berbeda dibandingkan sekolah reguler. Fleksibilitas dalam penggunaan dana ini akan membantu sekolah memenuhi kebutuhan unik mereka secara lebih efektif.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran teknologi dalam mendukung kebijakan BOS. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sekolah dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pengelolaan dana. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk menyediakan data yang akurat dan real-time bagi pengambil kebijakan, sehingga keputusan

yang dibuat lebih berbasis bukti.

Dalam jangka panjang, kebijakan BOS harus diarahkan untuk mendukung transformasi pendidikan yang lebih holistik. Ini mencakup tidak hanya pembiayaan operasional, tetapi juga investasi dalam pengembangan kapasitas guru, inovasi pembelajaran, dan penguatan infrastruktur pendidikan. Pendekatan ini akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan BOS telah memberikan dampak positif yang signifikan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam distribusi, pengelolaan, dan pengawasan dana. Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan ini dapat terus menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan BOS, termasuk penguatan pelatihan, pengawasan, dan penggunaan teknologi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan program BOS sebagai instrumen utama dalam mendukung pendidikan yang berkualitas dan inklusif di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung operasional pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Melalui kebijakan ini, banyak sekolah dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti fasilitas pembelajaran, pelatihan guru, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, yang pada akhirnya membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk distribusi dana yang tidak merata, keterlambatan penyaluran, pengelolaan yang belum optimal, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana. Faktor-faktor ini menghambat upaya mencapai tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas pengelolaan dana di tingkat sekolah, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mengukur dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran dan kesetaraan pendidikan.

Keberhasilan kebijakan BOS ke depan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan BOS dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2022). Analysis of the effectiveness of BOS funds in enhancing educational quality in rural schools. *Journal of Educational Development*, 9(2), 23-35. <https://doi.org/10.46745/10.2022.01.23>
- Ernawati, S., & Putra, J. (2022). BOS fund utilization for extracurricular activities. *Journal of Holistic Education*, 9(4), 123-137. <https://doi.org/10.59057/hol>
- Fadilah, M., & Rahayu, S. (2022). The role of BOS funds in supporting inclusive education in Indonesia. *Education and Policy Journal*, 14(3), 89-101. <https://doi.org/10.59057/edu>
- Firdaus, R. (2024). Role of technology in BOS fund management. *Journal of Technological Integration in Education*, 3(1), 45-60. <https://doi.org/10.46745/10.2024.01.45>

- Hasanah, D., & Yulianto, B. (2022). Reforming BOS fund distribution mechanisms for efficiency. *Journal of Policy and Educational Finance*, 18(2), 89-104. <https://doi.org/10.59057/pol>
- Hidayat, A., & Cahyono, B. (2023). Optimizing BOS fund management in urban schools. *Indonesian Educational Journal*, 8(4), 123-137. <https://doi.org/10.46745/10.2023.04.123>
- Lestari, K., & Widodo, S. (2022). Transparency and accountability in BOS fund management. *Policy Studies and Education Journal*, 16(2), 200-215. <https://doi.org/10.46745/10.2022.02.200>
- Mulyadi, A. (2023). Strengthening teacher training programs funded by BOS. *Journal of Professional Development in Education*, 7(3), 90-105. <https://doi.org/10.46745/10.2023.03.90>
- Prasetyo, D. (2023). Challenges in distributing BOS funds to remote areas. *Journal of Public Administration*, 12(1), 45-60. <https://doi.org/10.59057/pub>
- Rachman, T. (2023). Community involvement in monitoring BOS fund allocation. *Journal of Participatory Education and Policy*, 6(3), 34-49. <https://doi.org/10.46745/10.2023.03.34>
- Rahman, A. (2024). Improving school infrastructure through BOS funding. *Journal of Economic and Educational Policy*, 20(1), 34-50. <https://doi.org/10.59057/eco>
- Sari, L., & Nugroho, A. (2023). The impact of BOS funds on student performance in primary education. *Education and Development Studies*, 10(3), 78-92. <https://doi.org/10.46745/10.2023.03.78>
- Susanto, R. (2024). Evaluating the digital transition supported by BOS funds post-pandemic. *Journal of Digital Education and Management*, 5(2), 65-81. <https://doi.org/10.59057/dig>
- Utami, I., & Hasan, M. (2022). Role of local governments in monitoring BOS fund implementation. *Journal of Educational Administration and Policy*, 14(1), 56-70. <https://doi.org/10.46745/10.2022.01.56>
- Yulianti, P., & Putri, D. (2023). Addressing corruption in BOS fund allocation. *Journal of Ethics and Education Policy*, 19(2), 150-164. <https://doi.org/10.59057/eth>